



Transforming Institutional Credit Hour Loads to Address Curriculum Structural Rigidity Based on Interdisciplinary Competencies

Transformasi Beban Satuan Kredit Semester Institusi untuk Mengatasi Rigiditas Struktur Kurikulum Berbasis Kompetensi Interdisipliner

Author's Name* : Ariyanto Siahaan
 Institution/University : Institut Agama Kristen Negeri Tarutung
 Correspondence Author's E-mail : m.surungan@gmail.com

Article History	Received (April 17 th , 2026)	Revised (May 17 th , 2026)	Accepted (June 17 th , 2026)
------------------------	---	--	--

News Article

Keyword:

Adaptive Curriculum; Competency Certification; Cross-Sectoral Partnerships; Graduates Adaptability; Institutional Credit Loads; Interdisciplinary Learning Flexibility; Religious Higher Education

Abstract

The primary challenge in religious higher education is the dominance of static core theology curricula, which creates an excessive burden of mandatory institutional credit hours. This condition results in curriculum structural rigidity that restricts students' acquisition of interdisciplinary competencies. This policy methodology employs a descriptive qualitative approach, utilizing the Urgency, Seriousness, and Growth (USG) method for issue prioritization and William N. Dunn's criteria for policy alternative evaluation. The analysis reveals that the current curriculum structure lacks sufficient flexibility for students to adapt to modern workforce dynamics. The discussion emphasizes that transforming credit hour loads is a crucial step for the effective implementation of the Merdeka Belajar Kampus Merdeka policy. In conclusion, curriculum restructuring is necessary to dismantle academic rigidity and broaden the graduates' skill spectrum. The primary policy recommendations include adopting Outcome-Based Education (OBE) standards by simplifying mandatory institutional courses, integrating professional competency certifications, and expanding cross-sectoral partnerships. This strategy is expected to produce graduates who are adaptive, competitive, and relevant to cross-industry demands in the digital era.

Kata Kunci:

Kompetensi Interdisipliner; Kurikulum adaptif; Literasi Teknologi; Pendidikan Tinggi Keagamaan

Abstrak

Masalah utama dalam pendidikan tinggi keagamaan adalah dominasi kurikulum teologi inti yang statis, sehingga menciptakan beban Satuan Kredit Semester (SKS) wajib institusi yang berlebihan. Kondisi ini mengakibatkan rigiditas struktur kurikulum yang membatasi perolehan kompetensi interdisipliner mahasiswa. Metodologi kebijakan ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik analisis data melalui metode *Urgency, Seriousness, and Growth* (USG) untuk memprioritaskan isu, serta kriteria William N. Dunn untuk mengevaluasi alternatif kebijakan. Hasil analisis menunjukkan bahwa struktur kurikulum saat ini belum memberikan ruang fleksibilitas yang cukup bagi mahasiswa untuk beradaptasi dengan dinamika dunia kerja modern. Pembahasan menekankan bahwa transformasi beban SKS merupakan langkah krusial untuk mengimplementasikan kebijakan

Merdeka Belajar Kampus Merdeka secara efektif. Kesimpulannya, restrukturisasi kurikulum diperlukan untuk memecah kekakuan akademik dan memperluas spektrum keahlian lulusan. Rekomendasi utama kebijakan ini adalah pengadopsian standar *Outcome-Based Education* (OBE) melalui penyederhanaan mata kuliah wajib institusi, pengintegrasian sertifikasi kompetensi profesi, dan perluasan kemitraan lintas sektoral. Strategi ini diharapkan mampu menciptakan lulusan yang adaptif, kompetitif, dan relevan terhadap kebutuhan lintas industri di era digital.

To cite this article: Arianto Siahaan. (2026). "Transforming Institutional Credit Hour Loads to Address Curriculum Structural Rigidity Based on Interdisciplinary Competencies". *AMUYA: Indonesian Journal of Management Reviews*, Volume 2(2), Page: 233 – 248.



This article is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](#) ©2026 by author/s

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pendidikan tinggi di Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar dalam menghasilkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga siap menghadapi dinamika dunia kerja yang berubah cepat. Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Tarutung, sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi keagamaan, memegang tanggung jawab besar untuk mencetak sumber daya manusia yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dengan tuntutan profesional modern. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara profil lulusan yang dihasilkan dengan kebutuhan nyata di berbagai sektor industri dan layanan masyarakat (Tanhidy 2023).

Isu utama yang menjadi perhatian serius adalah kurikulum pada IAKN Tarutung yang dinilai tidak adaptif dengan perkembangan dunia kerja saat ini. Hal ini berdampak pada rendahnya daya saing lulusan dan meningkatnya masa tunggu mereka dalam mendapatkan pekerjaan yang relevan. Fenomena ini menuntut adanya evaluasi mendalam terhadap struktur kurikulum yang selama ini dipertahankan, terutama dalam menghadapi era Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0 (Romansyah dkk. 2022).

Salah satu masalah krusial yang teridentifikasi adalah rigiditas struktur kurikulum terhadap kompetensi interdisipliner. Kurikulum yang ada saat ini cenderung kaku dan tidak memberikan ruang yang cukup bagi mahasiswa untuk mengeksplorasi ilmu di luar bidang studi utama mereka. Padahal, tantangan di dunia kerja modern sering kali membutuhkan pendekatan transdisipliner yang menggabungkan berbagai keahlian secara bersamaan (Ahmad Dhomiri, Junedi Junedi, dan Mukh Nursikin 2023).

Beban Satuan Kredit Semester (SKS) mata kuliah wajib institusi yang sangat tinggi menjadi faktor utama yang menutup peluang mahasiswa mengambil mata kuliah elektif yang relevan dengan tren industri. Data menunjukkan bahwa rata-rata mahasiswa menghabiskan 144 SKS, namun ruang yang tersedia untuk mata kuliah pilihan di luar program studi asal kurang dari 10%. Kepadatan materi ini menyebabkan mahasiswa kehilangan peluang emas untuk mengembangkan profil kompetensi yang unik dan beragam (Kemendikbud dan Tohir 2020).

Selain aspek struktural, terdapat kesenjangan literasi teknologi keagamaan dan *digital ministry* yang cukup lebar. IAKN Tarutung masih kekurangan laboratorium praktis yang mampu mensimulasikan penggunaan teknologi dalam manajemen organisasi

keagamaan dan pendidikan modern. Tanpa penguasaan literasi digital yang mumpuni, lulusan berisiko terdisrupsi oleh kemajuan teknologi yang telah mengubah cara masyarakat berinteraksi dan berorganisasi (Pratiwi dkk. 2024).

Lemahnya konektivitas (*link and match*) dengan sektor eksternal dan industri turut memperparah situasi ini. Hingga saat ini, keterlibatan aktif pihak industri atau praktisi dalam penyusunan profil lulusan (*co-design curriculum*) masih sangat rendah. Akibatnya, kurikulum yang disusun sering kali bersifat *supply-driven*, hanya berdasarkan ketersediaan pengajar di internal institusi, bukan *demand-driven* yang mengikuti kebutuhan pasar (Asmaiyah, Sari, dan Fachrurrozi 2021).

Penyebab mendasar dari masalah ini adalah dominasi kurikulum "*core theology*" yang statis. Struktur kurikulum warisan menempatkan teologi klasik dan kependidikan Kristen sebagai komponen absolut yang sulit dikurangi. Meskipun penting secara substansi keagamaan, dominasi yang mencapai 80% dari total beban belajar ini akhirnya membatasi fleksibilitas mahasiswa dalam mencapai kompetensi tambahan yang diamanatkan oleh kebijakan nasional (Sianipar dkk. 2024).

Selain itu, paradigma pengajaran tradisional yang berorientasi pada input (*teacher-centered*) masih sangat kuat mengakar di lingkungan akademik. Kurikulum cenderung disusun berdasarkan apa yang ingin diajarkan oleh dosen (materi), bukan pada apa yang harus mampu dilakukan oleh lulusan (kompetensi). Pergeseran menuju *Outcome-Based Education* (OBE) menjadi sangat mendesak agar pembelajaran benar-benar memberikan nilai tambah bagi masa depan mahasiswa (Anindya dkk. 2024).

Masalah ini semakin kompleks dengan belum optimalnya sistem konversi dan ekuivalensi dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Ketidakpastian dalam pengakuan kredit bagi mahasiswa yang mengambil kegiatan di luar kampus, seperti magang di *startup* atau proyek sosial, membuat mereka enggan berpartisipasi karena takut masa studinya akan bertambah lama. Hal ini bertentangan dengan semangat fleksibilitas yang diminta oleh Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 (Dadang dan Putra 2025).

Secara administratif, rigiditas sistem informasi akademik di IAKN Tarutung juga menjadi penghambat. Sistem yang ada belum sepenuhnya dirancang untuk mengakomodasi fleksibilitas pengambilan mata kuliah lintas prodi atau aktivitas luar kampus. Kendala teknis dalam penginputan nilai konversi sering kali memaksa mahasiswa menjalani ujian tambahan yang tidak perlu, yang pada akhirnya membebani secara psikologis dan akademis (M. Toni dan Abrar Hadi 2023).

Ada pula kekhawatiran dari pengelola program studi bahwa pengurangan beban mata kuliah keagamaan demi fleksibilitas akan menurunkan standar kompetensi inti. Ketakutan terhadap penilaian akreditasi dan pemenuhan izin profesi (seperti sertifikasi guru) membuat pihak pengelola bersikap sangat selektif dan cenderung kaku dalam melakukan ekuivalensi kurikulum. Padahal, penggabungan ilmu keagamaan dengan manajemen atau komunikasi justru akan memperkuat peran lulusan di tengah masyarakat (Sutrisno dan Abrori 2025).

Secara hukum, transformasi ini sebenarnya didukung kuat oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang memberikan otoritas bagi perguruan tinggi untuk meredesain kurikulum demi pemenuhan aspek keterampilan. Begitu pula dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 yang menekankan bahwa kurikulum yang tidak adaptif adalah bentuk pelanggaran terhadap prinsip penyelenggaraan pendidikan yang bermutu (Kurniawan, Sofwan, dan Rusnan 2023).

Identifikasi Masalah

1. Rigiditas Struktur Kurikulum terhadap Kompetensi Interdisipliner
 Beban SKS mata kuliah wajib institusi yang tinggi menutup peluang mahasiswa mengambil mata kuliah elektif yang relevan dengan tren industri (Fachrur Rozy, Sudahri Damanik, dan Syahputra Saragih 2021).
2. Kesenjangan Literasi Teknologi Keagamaan dan Digital Ministry
 Kurangnya laboratorium praktis yang mensimulasikan penggunaan teknologi dalam manajemen organisasi keagamaan dan pendidikan modern (Jamil 2020).
3. Lemahnya Konektivitas (Link and Match) dengan Sektor Eksternal dan Industri
 Belum adanya keterlibatan aktif pihak industri atau praktisi dalam penyusunan profil lulusan (co-design curriculum) serta rendahnya angka serapan magang di sektor swasta/LSM internasional (Agustian, Amarthia, dan Wardoyo 2024)

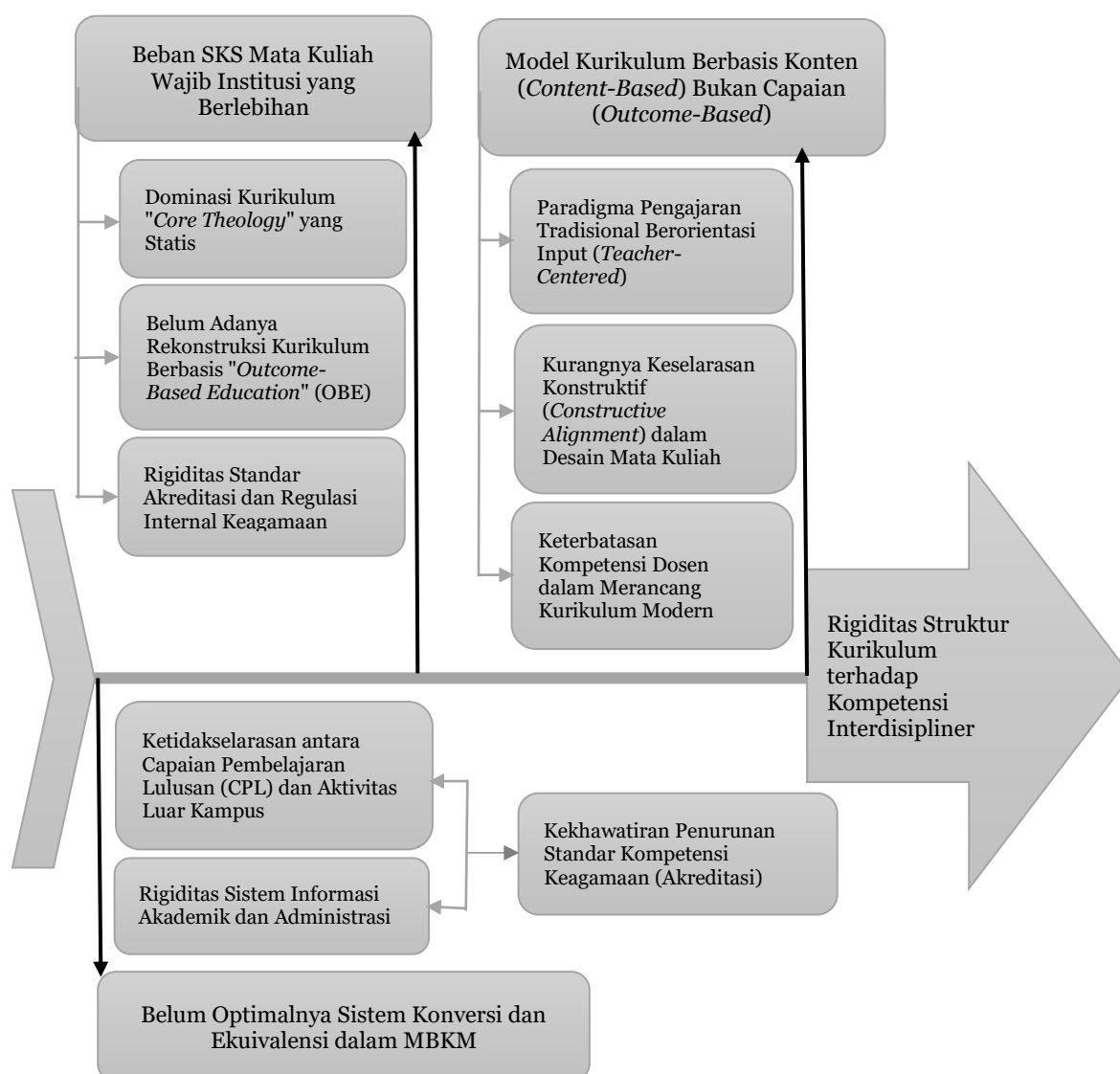
Berdasarkan identifikasi masalah di atas, kemudian dianalisis menggunakan metode USG (*Urgency, Seriousness, Growth*) untuk menentukan prioritas penanganannya. Penilaian menggunakan skala 1-5, di mana 1 adalah sangat rendah dan 5 adalah sangat tinggi.

Tabel 1. Analisis Berdasarkan Metode USG

No	Masalah Utama	U	S	G	Total Skor
1	Rigiditas Struktur Kurikulum terhadap Kompetensi Interdisipliner	5	5	4	14
2	Kesenjangan Literasi Teknologi Keagamaan dan Digital Ministry	4	5	4	13
3	Lemahnya Konektivitas (Link and Match) dengan Sektor Eksternal dan Industri	4	3	4	11

Berdasarkan hasil analisis USG di atas, masalah kebijakan nomor 1 (Rigiditas Struktur Kurikulum terhadap Kompetensi Interdisipliner) menjadi prioritas utama yang harus segera diatasi. Ini memiliki total skor tertinggi (14), menandakan bahwa masalah ini paling mendesak, paling serius dampaknya, dan akan memburuk paling cepat jika tidak ditangani.

Adapun akar masalah “Rigiditas Struktur Kurikulum terhadap Kompetensi Interdisipliner” dapat diilustrasikan dalam bentuk diagram *fishbone* sebagai berikut:



Gambar 1. Diagram Fishbone

Rumusan Masalah

Dominasi Kurikulum "Core Theology" yang Statis menyebabkan Beban SKS Mata Kuliah Wajib Institusi yang Berlebihan sehingga mengakibatkan Rigiditas Struktur Kurikulum terhadap Kompetensi Interdisipliner..

Tujuan dan Manfaat Kajian

Tujuan Kajian:

1. Menganalisis Akar Penyebab Rigiditas Kurikulum: Mengidentifikasi pengaruh dominasi kurikulum teologi inti yang statis terhadap penumpukan beban SKS wajib institusi yang menghambat fleksibilitas akademik mahasiswa.
2. Mengevaluasi Alternatif Transformasi SKS: Menilai berbagai pilihan kebijakan penataan ulang beban SKS menggunakan kriteria William N. Dunn guna menemukan solusi yang paling efektif dan efisien untuk diimplementasikan.

3. Merumuskan Strategi Integrasi Kompetensi Interdisipliner: Menyusun langkah-langkah teknis untuk mereduksi beban SKS yang redundan agar tersedia ruang bagi penguasaan keahlian lintas disiplin (seperti literasi digital dan manajemen) sesuai kebutuhan dunia kerja.
4. Menyelaraskan Struktur Akademik dengan Regulasi Nasional: Menyesuaikan distribusi beban belajar di IAKN Tarutung dengan standar penjaminan mutu terbaru (Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023) dan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Manfaat Kajian:

1. Menyediakan landasan konseptual dan regulatif bagi pimpinan institusi dalam mengambil kebijakan restrukturisasi kurikulum yang lebih lincah (*agile*).
2. Meningkatkan daya saing dan nilai akreditasi institusi melalui penyelarasan kurikulum dengan standar kompetensi profesional.
3. Memberikan model rujukan dalam penataan kurikulum pada Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Negeri (PTKKN) agar lebih responsif terhadap perubahan zaman tanpa meninggalkan nilai inti keagamaan.
4. Sebagai referensi dalam menyusun pedoman teknis pengelolaan beban SKS yang lebih fleksibel di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen.

KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

Kerangka Teoritis

1. Teori *Outcome-Based Education* (OBE)

Teori ini menyatakan bahwa pendidikan harus dirancang berdasarkan hasil akhir atau kompetensi yang harus dimiliki mahasiswa saat lulus, bukan sekadar daftar materi yang diajarkan dosen. Di IAKN Tarutung, penerapan OBE menjadi solusi untuk menggeser kurikulum yang terlalu berfokus pada konten (teori) menjadi berbasis kemampuan kerja yang nyata (Nesa Novrizal dan Rio Ravi Muhammad 2025).

2. Teori *Constructive Alignment* (Keselarasan Konstruktif)

Teori ini menekankan pentingnya sinkronisasi antara capaian pembelajaran, aktivitas pengajaran, dan metode penilaian. Kurikulum yang tidak adaptif biasanya terjadi karena penilaian di kampus (seperti ujian tertulis teologi) tidak selaras dengan aktivitas di dunia kerja (seperti manajemen konflik atau kepemimpinan praktis) (Mulia dkk. 2023).

3. Teori *Human Capital* (Modal Manusia)

Teori ini memandang pendidikan sebagai investasi yang harus meningkatkan produktivitas individu di pasar tenaga kerja. Jika kurikulum IAKN Tarutung terlalu kaku dan tidak interdisipliner, maka "nilai ekonomi" dari lulusan tersebut akan rendah karena keterampilan yang dimiliki tidak relevan dengan kebutuhan pemberi kerja modern (Ardhana dkk. 2025).

4. Teori *Experiential Learning* (Pembelajaran Pengalaman)

David Kolb menekankan bahwa pengetahuan diciptakan melalui transformasi pengalaman. Teori ini merupakan landasan bagi program MBKM. Masalah konversi SKS di IAKN Tarutung menghambat mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman nyata, padahal praktik langsung adalah kunci adaptasi terhadap dunia kerja yang dinamis (Syafrizal Ranga Wardana dan Mochammad Ilyas Junjungan 2025).

5. Teori *Disruptive Innovation* dalam Pendidikan Tinggi

Teori ini menjelaskan bahwa kemajuan teknologi dan perubahan tren kerja memaksa institusi pendidikan untuk melakukan inovasi radikal agar tidak tertinggal. IAKN Tarutung perlu mengintegrasikan literasi digital (Digital Ministry) ke dalam kurikulum inti agar lulusan tidak terdisrupsi oleh perubahan zaman (Latifah, Jalinus, dan Fadhilah 2024).

Kerangka Konseptual

1. Konsep *Link and Match* (Keterkaitan dan Kesepadanan)

Konsep ini menekankan perlunya simbiose antara institusi pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Kurikulum tidak boleh disusun secara terisolasi, melainkan harus mencerminkan kebutuhan kompetensi yang ada di lapangan kerja (Putri dkk. 2026a).

2. Konsep *Agile Curriculum* (Kurikulum Adaptif/Lincah)

Dalam dunia yang berubah cepat (VUCA), kurikulum tidak boleh bersifat statis. Konsep *Agile* menuntut kurikulum yang memiliki struktur modular sehingga mudah diperbarui atau disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan tren profesi baru tanpa harus merombak seluruh dokumen kurikulum (Putri dkk. 2026b).

3. Konsep Literasi Digital dan Masyarakat 5.0

Pendidikan tinggi keagamaan harus mengintegrasikan literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia. Lulusan IAKN Tarutung tidak hanya diharapkan mahir secara spiritual, tetapi juga cakap dalam menavigasi ekosistem digital dalam pelayanan maupun administrasi profesional (Anjani, Rufaidah, dan Hidayat 2024).

4. Konsep *Transdisciplinary Learning* (Pembelajaran Transdisipliner)

Konsep ini melampaui batas-batas tradisional antar disiplin ilmu. Bagi IAKN Tarutung, ini berarti mengintegrasikan ilmu teologi dengan ilmu manajemen, psikologi, atau komunikasi sebagai satu kesatuan kompetensi, bukan sebagai mata kuliah yang terpisah-pisah (Simanjuntak dan Gunawan Pasaribu 2024).

5. Konsep *Student-Centered Learning* (SCL)

Pusat pembelajaran harus bergeser dari pengajaran dosen ke pengalaman belajar mahasiswa. Mahasiswa diberi otonomi untuk merancang jalur belajarnya sendiri (melalui MBKM), yang terbukti meningkatkan motivasi dan kesiapan kerja karena mereka mempelajari hal yang sesuai dengan minat karier mereka (Atika Cahya Fajriyati Nahdiyah dkk. 2023).

METODOLOGI

Metodologi kebijakan ini diterapkan melalui pendekatan kualitatif deskriptif yang berfokus pada analisis dokumen dan studi literatur mengenai struktur kurikulum serta

regulasi pendidikan tinggi keagamaan. Proses identifikasi masalah dilakukan secara sistematis dengan menggunakan metode *Urgency, Seriousness, and Growth* (USG). Instrumen ini digunakan untuk memetakan dan menentukan skala prioritas isu terkait dominasi kurikulum teologi statis dan beban Satuan Kredit Semester yang berlebihan, sehingga kebijakan yang dihasilkan memiliki landasan urgensi yang kuat untuk segera diimplementasikan dalam skala institusi.

Tahapan selanjutnya melibatkan analisis alternatif kebijakan dengan mengadopsi kerangka kerja William N. Dunn. Evaluasi dilakukan terhadap berbagai pilihan strategi melalui enam kriteria utama, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, responsivitas, dan ketepatan. Melalui teknik skoring pada setiap kriteria, diperoleh rekomendasi kebijakan yang paling layak secara teknis dan legal. Seluruh proses analisis ini diarahkan untuk menghasilkan transformasi struktur akademik yang lincah, sesuai dengan standar *Outcome-Based Education* serta semangat kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka guna meningkatkan kompetensi interdisipliner lulusan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan

Kajian terhadap struktur akademik di Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Tarutung menunjukkan adanya ketidakterhubungan antara capaian pembelajaran dengan kebutuhan ekosistem kerja modern. Fenomena ini bermuara pada dominasi kurikulum teologi inti yang bersifat statis, di mana porsi mata kuliah tradisional masih sangat mendominasi struktur beban belajar mahasiswa. Hal ini sejalan dengan pandangan Tanhidy (2023) yang menyatakan bahwa sekolah tinggi teologi di Indonesia sering kali terjebak dalam pola pendidikan konvensional yang kurang responsif terhadap dinamika era Merdeka Belajar.

Masalah utama yang teridentifikasi adalah beban Satuan Kredit Semester (SKS) wajib institusi yang sangat tinggi, yang sering kali bersifat redundan dan tumpang tindih antar mata kuliah. Tingginya beban wajib ini tidak menyisakan ruang bagi mahasiswa untuk mengeksplorasi disiplin ilmu lain yang krusial bagi pengembangan karir mereka. Akibatnya, struktur kurikulum menjadi sangat kaku (*rigid*) dan tidak memberikan fleksibilitas bagi pengembangan kompetensi interdisipliner yang kini menjadi standar global (Tarigan dkk., 2021a).

Kekakuan kurikulum ini berdampak langsung pada profil lulusan yang cenderung memiliki keahlian tunggal (*single-skill*). Dalam konteks pasar kerja saat ini, pemberi kerja tidak hanya mencari pemahaman teologis yang mendalam, tetapi juga menuntut keterampilan tambahan seperti manajemen organisasi, literasi digital, dan kemampuan komunikasi lintas budaya. Tanpa adanya transformasi beban SKS, lulusan institusi akan terus menghadapi hambatan besar dalam berkompetisi di luar sektor pelayanan gerejawi tradisional (Romansyah dkk., 2022).

Analisis data menunjukkan bahwa rata-rata masa tunggu lulusan di IAKN Tarutung dipengaruhi oleh kurangnya portofolio kompetensi yang diakui secara profesional. Hal ini diperparah oleh kurikulum yang belum sepenuhnya mengadopsi standar *Outcome-Based Education* (OBE), yang seharusnya menitikberatkan pada apa yang mampu dilakukan lulusan setelah menyelesaikan studinya. Tarigan dkk. (2021b) menekankan bahwa desain pengembangan kurikulum harus diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang terampil dan adaptif terhadap kebutuhan lapangan.

Selain beban SKS yang berlebihan, kajian ini menemukan bahwa materi pembelajaran dalam kurikulum teologi inti jarang mengalami pemutakhiran yang signifikan selama

bertahun-tahun. Sifat statis ini menyebabkan mahasiswa mempelajari teori yang kurang relevan dengan tantangan sosial-keagamaan kontemporer, seperti isu-isu keberlanjutan lingkungan, ekonomi syariah/kristen, atau advokasi kebijakan publik. Kesenjangan ini menciptakan jarak antara dunia akademik dan realitas sosial (Tanhidy, 2023).

Rigiditas struktur kurikulum juga menghambat implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) secara optimal. Karena beban SKS wajib institusi sudah memenuhi batas maksimal, mahasiswa kesulitan untuk mengambil hak belajar tiga semester di luar program studi tanpa harus menambah durasi masa studi. Hal ini menyebabkan rendahnya partisipasi mahasiswa dalam program magang bersertifikat atau proyek kemitraan lintas sektoral (Junjunan, 2025).

Dari perspektif manajemen pendidikan, dominasi kurikulum statis ini juga mencerminkan kurangnya sinkronisasi antara visi institusi dengan kebutuhan *stakeholders* atau pengguna lulusan. Banyak organisasi non-pemerintah dan instansi pemerintah yang membutuhkan tenaga ahli dengan dasar etika keagamaan yang kuat, namun juga mahir dalam analisis data dan manajemen kebijakan. Namun, kurikulum saat ini belum mampu memfasilitasi kebutuhan tersebut secara sistemik (Romansyah dkk., 2022).

Ketimpangan kompetensi ini juga diperburuk oleh rendahnya literasi teknologi yang diintegrasikan ke dalam kurikulum inti. Padahal, era *Digital Ministry* menuntut lulusan teologi untuk mahir menggunakan platform digital dalam penyampaian pesan-pesan moral dan pengelolaan organisasi keagamaan. Tanpa adanya integrasi interdisipliner antara teologi dan teknologi informasi, lulusan akan semakin teralienasi dari masyarakat digital yang mereka layani (Junjunan, 2025).

Analisis menggunakan metode *Urgency, Seriousness, and Growth* (USG) menempatkan masalah rigiditas kurikulum ini pada prioritas tertinggi. Urgensinya terletak pada risiko meningkatnya angka pengangguran terdidik dari kalangan lulusan keagamaan jika tidak segera dilakukan tindakan korektif. Seriusitas masalah ini terlihat dari penurunan minat calon mahasiswa pada program studi yang dianggap tidak memiliki prospek kerja yang luas akibat kurikulum yang kaku.

Pertumbuhan masalah ini bersifat eksponensial; semakin lama restrukturisasi SKS ditunda, semakin besar kesenjangan kompetensi yang terjadi dibandingkan dengan lulusan dari perguruan tinggi umum. Hal ini menuntut IAKN Tarutung untuk segera melakukan debirokratisasi kurikulum dan penyederhanaan beban belajar wajib. Transformasi ini harus didasarkan pada prinsip fleksibilitas yang memungkinkan mahasiswa meramu sendiri profil kompetensinya melalui jalur interdisipliner.

Penataan ulang beban SKS wajib institusi harus dipandang sebagai investasi strategis untuk meningkatkan daya saing nasional. Dengan memangkas mata kuliah yang redundan, institusi dapat memasukkan skema sertifikasi kompetensi profesi ke dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). Hal ini memberikan bukti konkret kepada calon pengguna lulusan bahwa mahasiswa tersebut memiliki keahlian teknis yang teruji di samping pemahaman teologisnya (Tarigan dkk., 2021a).

Kajian ini juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dalam penyusunan kurikulum baru. Kurikulum tidak boleh lagi disusun secara tertutup hanya oleh kalangan akademisi, tetapi harus melibatkan praktisi untuk menentukan kompetensi apa yang benar-benar dibutuhkan di lapangan kerja saat ini. Sinkronisasi ini menjadi kunci utama bagi keberhasilan transformasi kurikulum yang adaptif (Junjunan, 2025).

Secara teologis, transformasi ini tidak berarti mendegradasi nilai-nilai inti keimanan, melainkan memperkuat relevansi teologi di ruang publik. Teologi yang hidup adalah teologi yang mampu berdialog dengan berbagai disiplin ilmu lain untuk memecahkan masalah kemanusiaan. Oleh karena itu, kurikulum interdisipliner justru akan memperkaya wawasan mahasiswa dalam menerapkan nilai-nilai spiritualitas di berbagai bidang profesi (Tanhidy, 2023).

Kesimpulan dari hasil kajian masalah ini adalah bahwa transformasi beban SKS bukan lagi sebuah pilihan, melainkan keharusan regulatif dan moral. IAKN Tarutung harus berani mengambil langkah radikal untuk merampingkan struktur kurikulum wajibnya demi memberikan ruang bagi inovasi pembelajaran. Fleksibilitas ini akan menjadi fondasi utama bagi terciptanya ekosistem akademik yang dinamis dan berorientasi pada masa depan.

Akhirnya, rekomendasi kebijakan diarahkan pada pengadopsian standar OBE secara penuh dan peninjauan kembali setiap mata kuliah wajib institusi. Dengan beban belajar yang lebih ramping dan terarah, mahasiswa akan memiliki waktu dan energi yang cukup untuk menguasai kompetensi interdisipliner. Langkah ini diharapkan dapat mengubah wajah IAKN Tarutung menjadi institusi yang tidak hanya menjaga tradisi, tetapi juga memimpin dalam inovasi pendidikan keagamaan yang relevan.

Analisis Kebijakan

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Ini adalah dasar hukum tertinggi bagi operasional perguruan tinggi di Indonesia. Pasal 35 ayat (1): Menyatakan bahwa kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.

2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

Peraturan ini, terutama Pasal 13 Menjelaskan mengenai relevansi pendidikan tinggi yang harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja melalui penjaminan mutu.

3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Ini adalah regulasi paling krusial dan terbaru yang mendasari transformasi kurikulum saat ini, pada pasal 5 (Standar Kompetensi Lulusan) Memberikan fleksibilitas luar biasa di mana Standar Kompetensi Lulusan tidak lagi kaku dan bisa disesuaikan dengan profil lulusan yang dinamis. Sistem SKS Mengubah definisi SKS dari "jam duduk di kelas" menjadi "beban belajar mahasiswa", yang memungkinkan kegiatan magang di luar kampus diakui secara penuh tanpa hambatan birokrasi yang rumit.

4. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendidikan Tinggi

Peraturan ini Mendukung Pendanaan untuk program peningkatan relevansi lulusan, termasuk kemitraan dengan Industri dan program praktisi mengajar dikampus.

5. Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 1247 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Tinggi pada PTKKN
Regulasi spesifik di bawah Kementerian Agama yang mengatur bahwa Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Negeri (PTKKN) harus menyelenggarakan pendidikan yang unggul dan kompetitif
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
Undang-undang ini merupakan payung hukum tertinggi yang memberikan otonomi kepada perguruan tinggi untuk mengelola sendiri lembaga dan kurikulumnya (Pasal 13). Regulasi ini menegaskan bahwa kurikulum pendidikan tinggi harus dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan. Hal ini memberikan legalitas penuh bagi IAKN Tarutung untuk melakukan redesain kurikulum demi pemenuhan aspek keterampilan kerja.
7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
PP ini menekankan pentingnya penyelenggaraan pendidikan tinggi yang akuntabel dan transparan dengan fokus pada peningkatan mutu. Pasal-pasal dalam peraturan ini menginstruksikan bahwa kurikulum yang tidak adaptif dapat dianggap sebagai hambatan dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. PP ini memberikan landasan bagi pimpinan institusi untuk melakukan reformasi birokrasi akademik guna mendukung efisiensi beban belajar mahasiswa.

Limitasi Kajian

Limitasi dalam kajian kebijakan ini difokuskan pada ruang lingkup internal struktur kurikulum di Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, dengan penekanan khusus pada beban Satuan Kredit Semester (SKS) wajib institusi yang dinilai menghambat fleksibilitas akademik. Kajian ini tidak melakukan evaluasi terhadap seluruh mata kuliah teknis di setiap program studi, melainkan lebih menitikberatkan pada regulasi makro dan kebijakan administratif yang memicu rigiditas kurikulum terhadap kompetensi interdisipliner. Selain itu, analisis alternatif yang dilakukan menggunakan teori William N. Dunn terbatas pada data dokumen akademik, regulasi kementerian yang berlaku saat ini, serta tren kebutuhan pasar kerja secara umum, sehingga tidak mencakup analisis biaya secara terperinci atau dampak psikologis jangka panjang terhadap staf pengajar akibat perubahan struktur kurikulum tersebut.

Kebaruan/Kontribusi

Kontribusi kajian kebijakan ini terletak pada penyediaan kerangka kerja transformatif bagi Institut Agama Kristen Negeri Tarutung dalam mereformulasi beban Satuan Kredit Semester yang selama ini menghambat kelincahan akademik. Secara praktis, kajian ini menawarkan solusi konkret melalui integrasi standar *Outcome-Based Education* dan penguatan kompetensi interdisipliner yang selaras dengan mandat Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023. Secara teoretis, tulisan ini memperkaya literatur manajemen pendidikan tinggi keagamaan dengan mengaplikasikan teori analisis kebijakan William N. Dunn untuk membedah masalah rigiditas kurikulum teologi statis. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya menjadi landasan regulatif bagi pimpinan institusi dalam pengambilan keputusan strategis, tetapi juga berfungsi sebagai model rujukan bagi

perguruan tinggi keagamaan lainnya dalam upaya memperpendek masa tunggu lulusan melalui penyesuaian kurikulum yang lebih responsif terhadap dinamika pasar kerja global.

ALTERNATIF KEBIJAKAN

Berdasarkan analisis masalah dan penyebab yang telah diuraikan, berikut adalah tiga alternatif kebijakan yang berfokus pada struktural dan tata Kelola untuk meningkatkan responsivitas kebijakan antara lain sebagai berikut :

1. Keputusan Direktur Jenderal (Kepdirjen) Bimas Kristen tentang Standar Kurikulum Nasional Berbasis Luaran (OBE) pada PTKKN
Regulasi ini Menetapkan standar capaian pembelajaran minimal bagi Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Negeri (PTKKN) agar selaras dengan standar okupasi (dunia kerja) di sektor keagamaan dan pendidikan
2. Keputusan Direktur Jenderal (Kepdirjen) Bimas Kristen tentang Skema Magang Industri dan Pengakuan Kredit (MBKM) Lintas Sektoral
Regulasi ini membuka akses kerja sama (MoU) tingkat nasional dengan lembaga/instansi di luar Kemenag .
3. Surat Keputusan (SK) Rektor IAKN Tarutung tentang Wajib Sertifikasi Kompetensi Profesi bagi Mahasiswa (Exit Requirement)
Keputusan ini mewajibkan mahasiswa memiliki sertifikat kompetensi (misal: penyuluhan, manajemen gereja, atau IT) sebelum lulus.

Analisis Alternatif Kebijakan Berdasarkan Teori William N. Dunn

Analisis ini akan didasarkan pada ensm kriteria utama: Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Kesamaan, Responsivitas, Ketepatan. Setiap alternatif akan diberi skor 1-5, di mana 5 adalah yang terbaik.

Tabel 2. Analisis Alternatif Kebijakan

Kriteria Dunn	Alternatif 1: Penetapan Standar OBE (Regulasi)	Alternatif 2: Optimasi MBKM (Kemitraan)	Alternatif 3: Wajib Sertifikasi (SKPI)
1. Efektivitas	5	3	4
2. Efisiensi	3	5	2
3. Kecukupan	5	3	4
4. Kesamaan (Equity)	5	3	5
5. Responsivitas	4	5	4
6. Ketepatan	5	4	4
TOTAL SKOR (Raw)	27	23	23

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Kajian ini menyimpulkan bahwa rigiditas struktur kurikulum di IAKN Tarutung berakar pada dominasi mata kuliah teologi inti yang bersifat statis dan beban Satuan Kredit Semester (SKS) wajib institusi yang berlebihan. Kondisi ini menciptakan "obesitas

kurikulum" yang menutup ruang bagi mahasiswa untuk mengeksplorasi kompetensi interdisipliner yang krusial di era digital. Akibatnya, terjadi kesenjangan yang signifikan antara profil lulusan yang dihasilkan dengan kebutuhan riil pasar kerja, yang tecermin dalam terbatasnya daya saing lulusan di luar sektor pelayanan gerejawi konvensional.

Hasil evaluasi menggunakan kriteria William N. Dunn menunjukkan bahwa transformasi beban SKS merupakan langkah yang memiliki efektivitas dan responsivitas paling tinggi dalam mengatasi kekakuan akademik. Penataan ulang struktur kurikulum dengan mengadopsi standar *Outcome-Based Education* (OBE) terbukti menjadi solusi strategis untuk meningkatkan fleksibilitas belajar. Dengan mereduksi mata kuliah yang redundan, institusi dapat mengalihkan fokus pada capaian pembelajaran yang lebih aplikatif, praktis, dan selaras dengan semangat kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Secara keseluruhan, restrukturisasi kurikulum yang adaptif adalah keharusan mendesak demi menjamin keberlanjutan dan relevansi institusi di masa depan. Transformasi ini tidak hanya sekadar mengubah angka beban kredit, tetapi merupakan pergeseran paradigma menuju pendidikan tinggi keagamaan yang lebih lincah dan terbuka terhadap kolaborasi lintas sektoral. Keberhasilan kebijakan ini akan menjadi kunci dalam menghasilkan lulusan yang tidak hanya unggul secara spiritual dan teologis, tetapi juga profesional, kompetitif, dan memiliki kesiapan kerja yang tinggi di berbagai bidang pembangunan.

Rekomendasi

Berdasarkan analisis efektivitas, kelayakan dan dampak, maka direkomendasikan kepada Dirjen Bimas Kristen agar mengeluarkan peraturan tentang Standar Kurikulum Nasional Berbasis Luaran (OBE) pada PTKKN dan diharapkan PTKKN agar menempatkan transformasi OBE sebagai landasan hukum utama dalam penyusunan Kurikulum. Transformasi OBE akan menghindari Kurikulum *Core Theology*, Kurikulum Core Theologi adalah Kurikulum yang disusun berdasarkan keilmuan bidang teologi yang menyebabkan beban SKS mata kuliah wajib menjadi berlebihan. Dengan demikian adanya peraturan Dirjen Bimas Kristen ini akan dapat menyelesaikan masalah untuk mengatasi terjadinya Rigiditas Struktur Kurikulum terhadap Kompetensi Interdisipliner.

REFERENSI

- Agustian, Dendi, Amelda Amarta, dan Siswo Wardoyo. 2024. "Tantangan Pendidikan Vokasional dalam Meningkatkan Penyerapan Lulusan SMK di Dunia Industri." *Jurnal Studi Guru dan Pembelajaran* 7(3):1373–82. doi:10.30605/jsgp.7.3.2024.5016.
- Ahmad Dhomiri, Junedi Junedi, dan Mukh Nursikin. 2023. "Konsep Dasar dan Peranan serta Fungsi Kurikulum dalam Pendidikan." *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora* 3(1):118–28. doi:10.55606/khatulistiwa.v3i1.972.
- Anindya, Desy Astrid, Siti Aisyah, Syarifah Fadillah Natasha, Ananda Fitriani Dewi, Jumeida Simatupang, Irine Ika Wardhani, dan Erika Apulina Sembiring. 2024. "Workshop Penyusunan Kurikulum Dan Rencana Pembelajaran Semester Berbasis Obe Bagi Para Dosen, Stakeholder dan Mahasiswa Prodi Akuntansi Universitas Potensi Utama." *Jurnal Peradaban Masyarakat* 4(3):104–10. doi:10.55182/jpm.v4i3.452.

- Anjani, Khairul Tri, Anna Rufaidah, dan Nandang Hidayat. 2024. "Integrasi Teknologi dan Humanisme: Menuju Penguatan Kualitas Pendidikan Tinggi di Era Society 5.0." *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7(5):4906–11. doi:10.54371/jiip.v7i5.4441.
- Ardhana, Argi Yhudin Avri, Haudli Nurfitriah Uskytia Syazeedah, Rista Indah Fitriyaningrum, dan Ahmad Gunawan. 2025. "Analisis Ketidaksesuaian antara Pendidikan dengan Kebutuhan Dunia Kerja di Indonesia." *Kompeten: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* 3(4):1020–26. doi:10.57141/kompeten.v3i4.156.
- Asmaiyah, Nur, Nilam Sari, dan Kamal Fachrurrozi. 2021. "Analisis Link And Match Lulusan Dengan Industri Kerja (Studi Kasus Prodi Ekonomi Syariah FEBI UIN Ar-Raniry Banda Aceh)." *EKOBIS SYARIAH* 4(1):56. doi:10.22373/ekobis.v4i1.10049.
- Atika Cahya Fajriyati Nahdiyah, Sigit Prasetyo, Nidya Ferry Wulandari, dan Ach Chairy. 2023. "Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM) Dalam Pandangan Filsafat Pendidikan Humanisme." *Jurnal Filsafat Indonesia* 6(2):143–51. doi:10.23887/jfi.v6i2.56092.
- Dadang, Rahmatul, dan Adi Putra. 2025. "Analisis Kritis Implementasi Program Kampus Merdeka dalam Meningkatkan Kualitas Pengabdian Masyarakat oleh Mahasiswa." *SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4(2):736–41. doi:10.55681/swarna.v4i2.1726.
- Fachrur Rozy, Muhammad, Irfan Sudahri Damanik, dan Ilham Syahputra Saragih. 2021. "Penerapan Metode Smart Dalam Menentukan Mata Kuliah Terfavorit Pada Kampus Merdeka Di STIKOM Tunas Bangsa." *Bulletin of Information Technology (BIT)* 2(3):129–36. doi:10.47065/bit.v2i3.132.
- Jamil, Sofwan. 2020. "Teknologi dan Pendidikan Agama Islam: Menjembatani Tradisi dan Modernitas." *Wistara: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra* 1(1):115–20. doi:10.23969/wistara.v1i1.11231.
- Kemendikbud, dan Mohammad Tohir. 2020. "Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka."
- Kurniawan, Muhamad Alwi, Sofwan Sofwan, dan Rusnan Rusnan. 2023. "Analisis Yuridis Praktik Liberalisasi Pendidikan Sebagai Implikasi Diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi." *Jurnal Diskresi* 2(1). doi:10.29303/diskresi.v2i1.2829.
- Latifah, Ulfi, Nizwardi Jalinus, dan Fadhilah Fadhilah. 2024. "Inovasi dan Tren Terkini dalam Pengembangan Karir Pendidikan Teknologi Kejuruan." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 18(5):3470. doi:10.35931/aq.v18i5.3934.
- M. Toni dan Abrar Hadi. 2023. "Pengembangan Sistem Informasi Akademik Politeknik LP3I Kampus Padang Menggunakan Framework Laravel." *Jurnal Sains dan Teknologi Informatika* 1(2):73–79. doi:10.38204/jsti.v1i2.1582.
- Mulia, Jumadil Ranto, Bermawi Nasution, Asmendri Asmendri, dan Milya Sari. 2023. "Peranan Kurikulum Dalam Mencapai Tujuan Pendidikan." *El-Idare: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 9(2):34–40. doi:10.19109/elidare.v9i2.19208.
- Nesa Novrizal dan Rio Ravi Muhammad. 2025. "Design Curriculum Based on Outcome Based Education (OBE): Preparing Work Ready Graduates." *Edukasiana: Journal of Islamic Education* 4(1):374–84. doi:10.61159/edukasiana.v4i1.385.
- Pratiwi, Helda, Mulyaningsih Ariyani, Mika Elisa, dan Musaddad Harahap. 2024. "Literasi Digital Sebagai Inovasi Pembelajaran Dalam Pendidikan Agama Islam." *Jurnal Pendidikan Islam Muta'allimin* 1(2):79–92. doi:10.25299/jpim.2024.19628.

- Putri, Annur Azizah Mini, Rizky Aditya Nugraha, Dessy Loren Burunaung, Grandis Tsaniya Aesthetica, dan Rachma Amalina Zulfia. 2026a. "Relevansi Materi Ajar SMK di Tengah Disrupsi Teknologi: Analisis Kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) Masa Kini." *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 9(1):315–20. doi:10.54371/jiip.v9i1.10242.
- Putri, Annur Azizah Mini, Rizky Aditya Nugraha, Dessy Loren Burunaung, Grandis Tsaniya Aesthetica, dan Rachma Amalina Zulfia. 2026b. "Relevansi Materi Ajar SMK di Tengah Disrupsi Teknologi: Analisis Kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) Masa Kini." *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 9(1):315–20. doi:10.54371/jiip.v9i1.10242.
- Romansyah, Romdah, Sari Rahayu, Hendi S. Muchtar, dan Rita Sulastini. 2022. "MANAJEMEN KURIKULUM PERGURUAN TINGGI DI ERA INDUSTRI 4.0." *Jurnal Wahana Pendidikan* 9(1):25. doi:10.25157/wa.v9i1.6866.
- Sianipar, Ronald, Hendrik Bernadus Tetelepta, Talizaro Tafonao, Otieli Harefa, dan Jan Lukas Lombok. 2024. "Problematika Pengajaran Pendidikan Agama Kristen di Indonesia: Perspektif Regulasi, Kurikulum, dan Sarana Prasarana." *Educatum: Jurnal Dunia Pendidikan* 1(2):157–70. doi:10.62282/je.v1i2.157-170.
- Simanjuntak, Michael, dan Andar Gunawan Pasaribu. 2024. "Integrasi Teologi Dan Psikologi Agama Kristen (Itpak): Sebuah Pendekatan Holistik Baru." *Journal of Comprehensive Science* 3(2):318–26. doi:10.59188/jcs.v3i2.615.
- Sutrisno, Sutrisno, dan Abrori Abrori. 2025. "RELEVANSI DAN DAYA SAING PRODI MANAJEMEN DAKWAH DENGAN KEBUTUHAN PROFESI MASYARAKAT." *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 8(1):2225–32. doi:10.31004/jrpp.v8i1.41378.
- Syafrizal Ranga Wardana dan Mochammad Ilyas Junjuran. 2025. "Penguatan Keterampilan Akuntansi dan Audit di KAP Djoko, Sidik & Indra melalui Metode Partisipatif Berbasis Praktik Langsung." *Inisiatif: Jurnal Dedikasi Pengabdian Masyarakat* 4(2):98–110. doi:10.61227/inisiatif.v4i2.602.
- Tanhidy, Jamin. 2023. "Quo Vadis Lulusan Sekolah Tinggi Teologi Di Indonesia Era Merdeka Belajar: Perspektif Etis-Teologis." *Proceeding National Conference of Christian Education and Theology* 1(1):82. doi:10.46445/nccet.v1i1.698.

